

Buletin *Bappebti*

Mengabdi Dengan Integritas



MENUJU KEDAULATAN TIMAH INDONESIA





KIAT-KIAT BERTRANSAKSI

Perdagangan Berjangka Komoditi

Minimalkan
Risiko Anda
Dalam **Bertransaksi**
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Cara Aman
Bertransaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi

Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

Jadilah Investor
yang **Cerdas**

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.

Sebelum melakukan investasi di bursa berjangka, sebagai calon investor yang belum mengerti benar investasi kontrak berjangka agar mempertimbangkan sepuluh langkah berikut:

- 01** Pertama. Siapa saja yang berminat untuk berinvestasi dalam kontrak berjangka, hendaknya memiliki dana lebih yang bukan uang pinjaman dan bukan uang yang masih berupa transaksi margin.
- 02** Kedua. Calon investor perlu memikirkan persiapan uang jaminan (margin) karena dalam melakukan transaksi kontrak berjangka, pihak yang melakukan penjualan maupun pembelian harus memberikan uang jaminan. Oleh karena kontrak berjangka memperdagangkan risiko, risiko itu harus ada jaminannya.
- 03** Ketiga. Calon investor perlu memahami secara nyata produk yang ditransaksikan di bursa dan faktor sifat dan karakteristiknya mengingat masing-masing jenis memiliki ciri yang berbeda.
- 04** Keempat. Investor harus menyediakan investasi dengan dana yang terencana dan siap menghadapi risiko terburuk, yaitu kerugian.
- 05** Kelima. Dana cadangan perlu disiapkan pula untuk membeli kontrak berjangka komoditi lain yang pasarnya terlihat sangat aktif. Oleh karena itu, portofolio investasi dilakukan secara menyebar untuk menekan risiko seminimal mungkin.
- 06** Keenam. Dalam hal tidak ada transaksi short dalam kontrak berjangka, jangan melakukan investasi atau transaksi coba-coba.
- 07** Ketujuh. Calon investor (nasabah) dianjurkan memilih pialang yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan layanan terbaik dari berbagai segi, terutama penetapan jumlah dana yang diperbolehkan untuk diinvestasikan dan fee yang harus dibayar karena di sana tidak ada patokan tetap dan semuanya tergantung pada pialang.
- 08** Kedelapan. Agar calon investor mempersiapkan data historis pergerakan harga kontrak berjangka komoditi atau produk yang diperdagangkan di pasar internasional atau lokal selama paling tidak tiga bulan ke belakang untuk bahan analisis dan melihat kecenderungan pergerakan pasar. Dengan demikian, frekuensi kenaikan harga untuk investasi dapat ditentukan besarnya.
- 09** Kesembilan. Calon investor hendaknya mempertimbangkan ekonomi makro, keadaan perdagangan luar negeri, serta kebijakan yang terkait dalam kontrak berjangka maupun produknya. Selain itu, keadaan alam (cuaca) perlu diperhatikan pula untuk kontrak berjangka komoditi. Harga-harga komoditi internasional pun harus dipelajari karena penetapan harga komoditi lokal tidak berbeda jauh dengan harga komoditi internasional yang sejenis.
- 10** Kesepuluh. Calon investor harus memperhatikan batas akhir kontrak karena saat kontrak habis, investor siap menerima barang yang jumlah dan volumenya bergantung pada nilai investasi. Hal itu akan menambah biaya berupa ongkos pengiriman, penyimpanan, dan ongkos asuransi.

Jika kesepuluh langkah ini diterapkan, risiko yang mungkin timbul dalam berinvestasi di bursa berjangka diharapkan dapat dihindari, namun demikian, calon investor harus tetap berhati-hati dan waspada.

BERITA UTAMA

04

Menuju
Kedaulatan
Timah
Indonesia



BERJANGKA

10

Kalbar Perkuat Pengawasan PBK

RESI GUDANG

12

Genjot SRG dengan Edukasi

AGENDA FOTO

14

- Bimtek Calon Pengelola Gudang SRG
- Konsinyering Monitoring Pengenaan Sanksi Administratif
- Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
- FKT Penyusunan Program Dana Dekonsentrasi Pengembangan PLK 2017

DARI LAPANGAN

21

Layanan
24 jam
Unit TI
Bappebti



AKTUALITA

16

- Targetkan UMKM Nasional, Lelang Gula Sepakat Dimulai Awal 2018
- Bappebti Cabut Pembekuan Izin PT Menara Mas Futures

ANALISA

18

- Iklim Usaha Kondusif, Ekspor Timah Diprediksi 78 ribu ton
- Produksi CPO Indonesia dan Malaysia Melonjak Naik

KIPRAH

24

Nursalam,
Dirut PT Indonesia Clearing House

Menapak
Karir
dari Zona
Berbeda



ENGLISH CORNER

19

- 2020 Tin Reserves Indonesia Predicted Up
- ICDX Gold Contract Interesting Market

KOLOM

23

Syarat Keberhasilan Kontrak Berjangka

Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

www.bappebti.go.id

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Subagiyo
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Gita Regina, Leli Wulandari

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172,
Jakarta Pusat

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
ti @InfoBappebti
ig @Bappebti



Menuju Kedaulatan Timah Indonesia

Setelah sukses menyelenggarakan pasar fisik timah, ICDX menggulirkan Pusat Logistik Berikat timah dan dalam waktu dekat meluncurkan kontrak berjangka timah. Ketiga instrumen ini diyakini akan membawa Indonesia sebagai produsen timah yang berdaulat.

Indonesia yang memiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung- Babel dikenal memiliki kekayaan timah yang melimpah. Dari zaman ke zaman, deposit bijih timah di sekitar dua pulau besar yang ada di provinsi ini- Pulau Bangka dan Pulau Belitung- laksana magnet yang menarik para pemburu tambang.

Bahkan, Sutedjo dalam bukunya

'Sejarah Timah Indonesia' [1996], menduga timah di Belitung sudah ditambang sebelum abad ke-17. "Kalau dikaitkan dengan kemampuan Belitung untuk mengeksport barang dari besi [antara lain kapak dan parang] sebelum abad ke-17, sangat mungkin paku-timah itu sudah diproduksi juga di masa itu. Artinya, timah sudah ditambang di Belitung sekurang-kurangnya pada abad

ke-17,” tutur Sutedjo dalam bukunya.

Memang tidak ada catatan pasti sejak kapan timah sebagai komoditas bernilai ekonomis ditemukan di Bangka dan Belitung. Hanya disebutkan, sejarah penambangan timah di dua pulau ini sudah melewati masa yang cukup panjang, dari zaman Kesultanan Palembang, kemudian di masa pemerintahan kolonial Belanda, dan hingga kini pasca kemerdekaan.

Merujuk sejarah di atas, amat jelas jika cadangan timah Indonesia dari tahun ke tahun semakin menipis. Dan harus diakui, timah sebagai salah satu komoditi unggulan strategis Indonesia, sejak ratusan tahun lalu pasar dan harganya masih ada di bawah kendali pelaku asing- luar negeri. Akibatnya harga timah di dalam negeri cenderung ditekan, dan tanggung jawab untuk mereklamasi bekas tambang timah tidak dapat direalisasikan.

Padahal sekedar catatan, Indonesia menjadi produsen dunia terbesar setelah Tiongkok. Tapi dari sisi ekspor, Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar nomor satu di dunia.

Syukurnya, sejak 30 Agustus 2013, lalu, Indonesia telah memiliki acuan harga timah ekspor melalui mekanisme pasar fisik yang diselenggarakan Indonesia Commodity and Derivative Exchange- ICDX atau dikenal juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI.

Menurut Direktur Utama ICDX, Lamon Rutten, hingga saat ini harga timah ICDX telah mempengaruhi pasar timah lainnya yang ada di mancanegara. “Bahkan, terkadang harga timah ICDX jauh lebih menarik bagi smelter dibandingkan pasar lainnya.”

“Keberhasilan Indonesia menciptakan acuan harga timah ekspor telah diperhitungkan negara-negara pengguna timah yang notabene negara industri,” kata Lamon, di acara *Indonesia Tin Conference and Exhibition-ITCE- 2017* yang diselenggarakan di Nusadua, Bali, 27-29 Agustus 2017.

Sebagai bukti, volume ekspor

timah saat ini telah mencapai 68,76 % ditujukan ke negara pengguna. Padahal sebelum adanya bursa timah di Indonesia, nyaris 90 % volume timah di ekspor ke Singapura. Lalu, dari negara ini kemudian diekspor ke berbagai negara lain.

Sekedar informasi, selain ke Singapura, timah yang diperdagangkan di ICDX juga diekspor ke Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Korea, India, Taiwan, Italia, China, Afrika, Spanyol, Arab Saudi, Inggris, Malaysia, Turki, Hongkong, Thailand, serta Vietnam.

Senada dengan itu, juga diungkapkan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi. Dia bilang, dengan berdirinya pasar fisik timah, ICDX sebagai bursa berjangka komoditi telah nyata berkontribusi bagi perekonomian nasional. “Harus diakui dengan adanya pasar fisik timah ICDX tersebut, menjadikan Indonesia sebagai pasar dan sekaligus referensi harga timah baik di dalam negeri maupun di pasar dunia,” ujar Bachrul.

Mekanisme pasar fisik timah ICDX telah terselenggara sejak tahun 2013, lalu, seiring keluarnya Permendag No. 78/M-DAG/PER/12/2012 jo. Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013, dan kemudian

disempurnakan menjadi Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2014, jo. Permendag No. 33/M-DAG/PER/11/2015, tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Bachrul menambahkan, tujuan dari kebijakan itu untuk menciptakan pasar timah yang terorganisir, adil dan transparan di dalam negeri. Di samping itu, akan tercipta acuan harga timah di dalam negeri dan dapat mendorong berkembangnya industri hilir timah.

Dengan adanya acuan harga timah di dalam negeri, maka pemerintah dapat menggunakannya sebagai variabel dalam pengambilan keputusan maupun perhitungan royalti timah ekspor.

Tata Kelola

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, yang mewakili Presiden RI, Joko Widodo saat membuka ITCE 2017, menilai, perbaikan tata kelola sektor tambang mineral dan batubara- Minerba khususnya pada tambang timah hingga saat ini sudah mulai tampak membaik. Hal itu terlihat pada indikator peningkatan ekspor komoditas timah dari Indonesia yang dicatat berdasarkan hasil transaksi di bursa timah ICDX.

“Peningkatan akuntabilitas transaksi



komoditas timah dengan menggunakan ICDX sebagai rujukan harga komoditas timah Indonesia, akan meningkatkan nilai tambah pengelolaan timah nasional. Transaksi melalui ICDX telah menekan terjadinya ekspor timah ilegal maupun penjualan dalam negeri ilegal,” terang Jonan.

“Jadi pasar fisik timah ekspor yang terpusat di ICDX menjadi salah satu sarana dalam menekan perdagangan timah ilegal ke luar negeri. Karena perdagangan timah ilegal itu dapat mempengaruhi harga dan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan di lokasi penambangan. Karena yang ilegal itu, setelah penambangan ditinggalkan begitu saja, sehingga lingkungan menjadi rusak,” tegas Jonan.

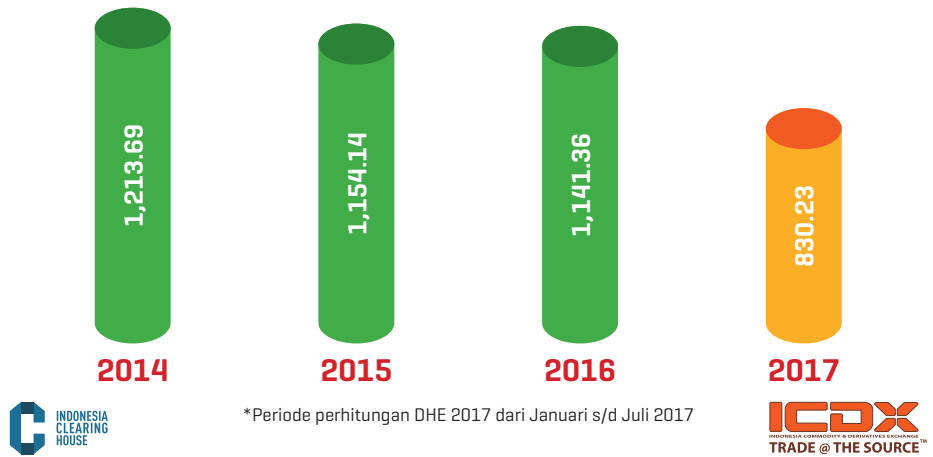
Jonan juga bilang, salah satu keuntungan dari sisi pemerintah dengan adanya transaksi komoditi timah di ICDX adalah hadirnya harga acuan komoditi timah di Indonesia. “Berdasarkan harga acuan itu pula pemerintah dapat dengan mudah melakukan perhitungan penerimaan negara dari sisi pajak dan royalti tambang timah,” papar Jonan.

Oleh sebab itu, lanjut Jonan, pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, disebutkan pada Pasal 6 Ayat 5 d, “besaran harga mineral logam acuan- HMA sebagaimana dimaksud pada ayat [4] ditetapkan mengacu pada publikasi harga mineral logam yang dikeluarkan, antara lain oleh; Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, untuk komoditi timah.” Dan kebijakan itu telah efektif berlaku sejak dikeluarkan pada 11 Januari 2017, lalu. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan harga harian timah ICDX sebagai harga acuan di dalam negeri.

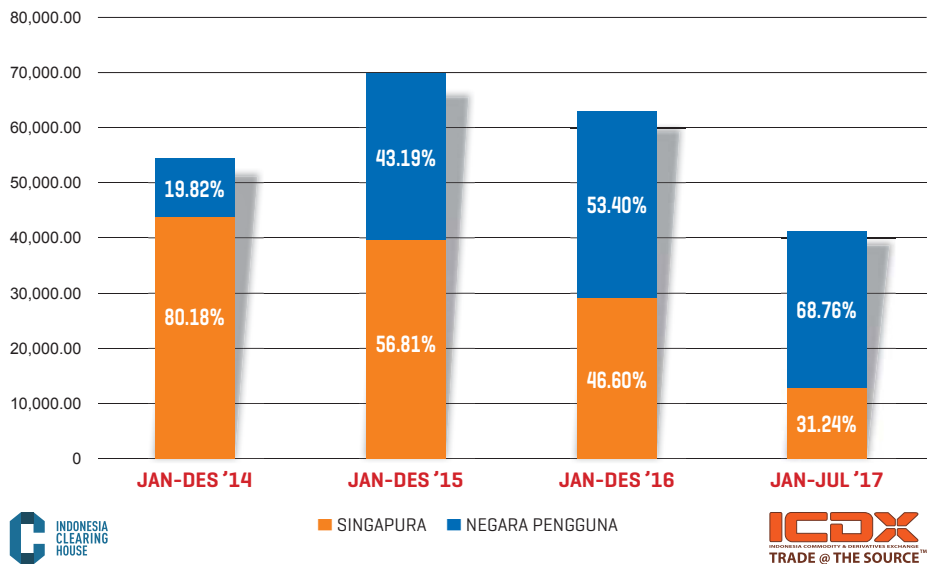
Penetapan ICDX sebagai acuan harga patokan timah bukan tanpa alasan. Menurut Jonan, sejak awal beroperasi, bursa timah ICDX telah membuktikan

DEVISA HASIL EKSPOR TIMAH INDONESIA

[Dalam Jutaan Dollar AS]



EKSPOR LANGSUNG KE NEGARA PENGGUNA



sebagai pasar timah di dalam negeri dengan masuknya para pembeli timah dari berbagai negara. Dari data yang dimilikinya, sebelum adanya bursa timah ICDX, ekspor timah Indonesia hampir 84% ditujukan ke Singapura, tetapi kini hanya tinggal 45%.

“Itu dapat diartikan negara-negara industri pengimpor sudah langsung melakukan pembelian melalui bursa timah ICDX,” terangnya.

Belajar dari timah, Jonan mengungkapkan, kementerian yang dipimpinnya tertarik untuk bisa menghadirkan pasar untuk komoditi mineral lainnya di dalam negeri sebagai acuan harga. Sebab, saat ini ada dua belas mineral yang harga acuannya ditetapkan berdasarkan harga acuan dari pasar luar negeri. Dua belas komoditi itu yakni, nikel, kobalt, timbal, seng, bauksit, besi, emas, perak, tembaga, mangan,

Keberhasilan Indonesia menciptakan acuan harga timah ekspor telah diperhitungkan negara-negara pengguna timah yang notabenenya negara industri.

krom dan titanium.

"Pada dasarnya karakter pelaku usaha timah nyaris sama dengan 12 komoditi mineral tersebut," imbuh Jonan.

Komisaris ICDX, KH. Said Aqil Siradj, dalam sambutannya di ITCE 2017 juga mengatakan, komoditi timah merupakan mineral yang tidak bisa diperbaharui. "Untuk itu mari kita jaga agar sumber daya alam yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita tak lantas habis begitu saja. Maka tata kelola dan tata perdagangannya harus diatur sedemikian rupa sehingga *fair* dan transparan," ujar Said Aqil.

Keberadaan pasar fisik timah ICDX memang mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah para pelaku usaha yang menggunakannya. Data terakhir ICDX menyebutkan, saat ini telah terdaftar 35 perusahaan pemegang Ekportir Terdaftar Timah (ET-Timah) yang bertindak selaku *seller* dan 32 perusahaan dari luar negeri yang bertindak selaku *buyer*.

Sedangkan dari sisi harga, pergerakan harga timah di ICDX mengalami peningkatan sebesar 10,04% sepanjang tahun 2016, dan sampai dengan periode Juli 2017 harga rata-rata timah berkisar di USD 20.067 per ton. Adapun pada akhir Juli 2017 harga timah mencapai USD 21.100 per ton atau mengalami peningkatan sekitar 7,76% dari harga di akhir bulan Juni 2017. 📌

Ajang ITCE 2017 di 'Mata Tokoh'



ITCE merupakan event tahunan yang digelar ICDX, dan tahun ini sudah memasuki tahun ke-empat. Kegiatan ITCE diselenggarakan selama 2 hari, di Nusadua, Bali, 27-29 Agustus 2017, mengundang 200 peserta lokal dan internasional yang terdiri dari perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, pelaku usaha timah (pihak penjual dan pembeli timah).

Dirut ICDX, Lamon Rutten, memaparkan, salah satu tujuan ITCE adalah sebagai ajang pertukaran informasi para pelaku usaha timah, baik yang ada di dalam negeri maupun dari mancanegara. Dari pertemuan itu diharapkan menghasilkan inovasi terbaru diberbagai bidang industri timah.

Di lain sisi, ICDX juga berharap ITCE menjadi salah satu ajang bergengsi di dunia karena senantiasa mempresentasikan narasumber yang kredibel dan kapabel dibidangnya. Untuk tema yang diusung pada ITCE 2017 yaitu, *Tin Beyond Boundaries; Integrating the Tin Industry for Sustainable Economic Growth*.

"Integrasi perdagangan timah di Indonesia semakin modern dengan

berbagai *platform* yang tersedia dan menjadikan komoditi timah sebagai sumber pembiayaan untuk keberlangsungan industri tambang timah," terang Lamon Rutten menegaskan alasan mengambil tema ITCE 2017.

Sementara Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, "Saya atas nama Kementerian ESDM mengucapkan selamat kepada ICDX dan seluruh peserta Tin Conference, semoga Indonesia dapat mewujudkan kedaulatannya terutama di sektor tambang mineral khususnya timah."

"Secara pribadi saya sangat mendukung acara seperti ini. Karena forum seperti ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi dan kerjasama dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola perdagangan timah di Indonesia," kata Ignasius Jonan, bersemangat.

Sedangkan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, juga menyampaikan apresiasi langkah strategis ICDX yang rutin menyelenggarakan ITCE sejak tahun 2014, lalu.

"Pertemuan penting seperti ini bukan saja pertukaran informasi, melainkan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yakni sebagai produsen sekaligus pasar yang menjadi acuan harga timah," ucap Bachrul Chairi. 📌

Integrasi PLB dengan Kontrak Berjangka Timah

Sejak paket kebijakan kedua di bidang ekonomi digelontorkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2015, lalu, terbuka peluang bagi pihak swasta mengoperasikan Pusat Logistik Berikat- PLB. Maka peluang itu pun ditangkap oleh ICDX dengan mendirikan anak usaha PT ICDX Logistik Berikat- ILB. Beroperasinya ILB itu pun didukung dengan keluarnya payung hukum dari Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan pada 13 Juni 2017, lalu, yang menerbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai, Nomor Per-10/BC/2017, tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam Rangka Ekspor dan atau *Transshipment*.

Sesuai dengan tujuannya, ILB yang telah dibangun di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, akan menjadi lumbung penyimpanan timah di dalam negeri namun dengan status siap ekspor dan telah imun. Demikian antara lain dikatakan Direktur Utama ILB, Henry Chandra, kepada media disela-sela penyelenggaraan ITCE 2017, di Nusadua, Bali, 27-29 Agustus 2017.

"Dengan adanya ILB, komoditas timah bisa disimpan selama tiga tahun. Jadi tidak harus cepat-cepat ekspor timah ke luar negeri yang kemudian menguntungkan gudang di luar negeri. Karena produk timah yang disimpan di ILB sudah imun dan sudah dianggap sebagai barang ekspor," terangnya.

Sebagai informasi, selama ini timah produksi Indonesia banyak ditimbun di Singapura. Sehingga, proses perdagangan multilateral justru terjadi di Singapura, dan negara jiran itu juga diuntungkan dengan adanya dana



pengelolaan gudang. "Nah, jika timah tersebut dapat disimpan di ILB, maka komposisi perdagangan timah Indonesia bisa berdaulat. Artinya, timah dapat di simpan ketika harga rendah, dan dikeluarkan saat harga tinggi. Intinya, ILB akan menahan persediaan timah lebih lama, dan menjadi salah satu strategi menahan laju ekspor timah," ujar Henry.

Selain itu, ILB akan efektif menurunkan beban biaya logistik dan waktu bongkar muat-*dwelling time*. Sebab, timah yang sudah berada di dalam gudang ILB dapat diperjualbelikan tanpa harus keluar dari tempat tersebut. Dengan begitu, transaksi terus mengalir tanpa perlu adanya lalu lintas logistik.

"Jadi bisnis modelnya, timah yang sudah ditransaksikan di pasar fisik ICDX dapat di simpan di ILB. Dan pemilik barang akan mendapatkan resi

gudang. Dengan resi ini, pemilik barang dapat melakukan kembali transaksi di ICDX. Sehingga, barang tetap berada di ILB, tapi transaksi dapat terjadi terus berjalan. Apa lagi timah memiliki sifat yang tidak akan rusak walaupun disimpan dalam waktu lama," katanya.

Di masa mendatang, Henry memastikan, ILB tidak hanya berperan sebagai penyimpanan komoditi timah, melainkan juga berpotensi untuk komoditi unggulan ekspor lainnya seperti nikel, bauksit, CPO, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan masih banyak lagi.

"Jika kita melihat suksesnya dari beberapa bursa berjangka komoditi di negara-negara maju, itu dikarenakan dukungan kebijakan pergudangan yang memadai dan skema ekspor yang memudahkan pihak importir. Oleh karena

Kuncinya adalah sosialisasi, agar pelaku usaha mengerti soal *futures* timah. Daripada cepat-cepat meluncurkan, lebih baik kita dipersiapkan sebaik mungkin bersama Bappebti.

itu, dengan adanya ILB akan mendukung transaksi pasar fisik timah dan kontrak berjangka timah di ICDX,” imbuh Henry Chandra.

Kontrak Timah

Dirut ICDX, Lamon Rutten, juga mengatakan, dengan adanya ILB menjadi faktor pendukung terlaksananya kontrak berjangka timah. “Karena, setiap orang bisa membeli timah dari ILB dan menjualnya kembali di ICDX. Jadi setelah timah dari smelter berada di ILB, nantinya bisa digunakan untuk kontrak *futures* maupun di pasar fisik,” tuturnya.

Menurut Lamon Rutten, kontrak berjangka memang sangat penting untuk membuat harga timah di Indonesia bisa menjadi referensi harga secara global. Bahkan katanya, tanpa kontrak tersebut harga timah Indonesia tidak akan jadi referensi harga timah global.

Saat ini, pelaku usaha timah yang bertansaksi di ICDX hanya bisa menggunakan pasar fisik dan sulit memprediksi harga timah ke depan. Karena itu, mereka lebih memilih bertransaksi di London Metal Exchange-LME yang menyediakan produk *futures*.

“Kuncinya adalah sosialisasi, agar pelaku usaha mengerti soal *futures* timah. Daripada cepat-cepat meluncurkan, lebih baik kita dipersiapkan sebaik mungkin bersama Bappebti,” jelas Lamon.

Kami pun perlu berkoordinasi dengan perusahaan pialang berjangka dalam perdagangan kontrak timah, tambah Lamon. Karena nantinya investor atau masyarakat yang mau transaksi kontrak berjangka timah harus melalui perusahaan pialang berjangka.

“Beberapa perusahaan pialang berjangka Anggota ICDX sudah ada yang tertarik dengan kontrak berjangka timah. Kalau menurut kami, ini merupakan indikasi mereka yang terbiasa bertransaksi di OTC- *over the counter* di luar negeri, akan menarik dananya untuk transaksi di ICDX. Harapan kita seperti itu,” kata Lamon optimis.

Menanggapi rencana ICDX akan meluncurkan kontrak berjangka timah, Kepala Bappebti Bachrul Chairi, pun menyambut positif. “Selama ini pasar komoditas timah dunia ditentukan oleh perdagangan di London Metal Exchange. Namun, ICDX mulai menunjukkan kemampuannya sebagai pembentuk harga komoditas timah nasional yang juga diperhitungkan pelaku usaha global.”

“Bagaimana kita melihat ICDX sudah diperhitungkan pasar global? Mari kita lihat dari data harga timah ICDX yang tidak berbeda jauh dengan harga di LME. Meski jumlah pelaku usaha timah ICDX baru mencapai 72 perusahaan [36 penjual dan 36 pembeli], tetapi harga dan volume transaksinya cukup berkualitas,” papar Bachrul.

Jadi, kontrak berjangka timah itu sangat penting. Karena bagi pelaku pasar dapat melakukan lindung nilai atas komoditas fisik akibat risiko fluktuasi harga yang terjadi, tambahnya. “Di pasar *futures*, pengusaha *smelter* atau produsen bisa mengasuransikan harga. Kalau harga di pasar fisik turun, harga *futures* yang naik bisa menutupi kerugian. Sehingga nanti sistemnya seperti yang selama ini dilakukan di LME akan pindah ke Indonesia yakni ICDX,” imbuh Bachrul Chairi. 📌

Pakta Integritas Seller ICDX



CATATAN penting dari perhelatan ITCE 2017, lalu, yakni para pelaku eksportir timah atau pun *smelter* menunjukkan komitemennya pada tercapainya perdagangan timah yang *fair* dan transparan. Sehingga pasar timah Indonesia menjadi acuan dunia baik di pasar fisik maupun di pasar *futures*.

Bukti komitemen para *smelter* yang berjumlah 36 itu, dihadapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi serta Komisaris dan Direksi ICDX, menandatangani Pakta Integritas Anggota Penjual Timah Batangan ICDX.

Isi pakta integritas itu yakni; *Pertama*, Anggota penjual timah murni batangan ICDX berkomitmen menjaga integritas dan kualitas mutu timah yang diproduksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang tercantum dalam kontrak fisik Timah Murni Batangan ICDX, dengan tingkat kemurnian maximum 99,9%.

Kedua, timah murni batangan yang diproduksi berasal dari tambang timah yang bersertifikat *Clean and Clean- CnC* yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, dan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Tata Cara Ekspor Timah Murni Batangan. 📌



Kalbar Perkuat Pengawasan PBK

Bappebti berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK.

Bappebti memiliki komitmen tinggi dalam pengawasan dan penanganan kasus hukum di bidang PBK, baik bagi perusahaan legal resmi memiliki izin maupun ilegal. Meski Bappebti kerap menghadapi rintangan dalam tindakan tegasnya, namun regulator tunggal industri PBK terus berupaya dan menjalin sinergitas dengan banyak pihak.

Di tingkat pusat, Bappebti mewakili Kementerian Perdagangan tergabung

dalam Tim Satgas Waspada Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Satgas Waspada Investasi ini merupakan wadah atau forum yang menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Terkait itu, di berbagai daerah pun Bappebti rutin melakukan rapat

koordinasi dengan menggandeng aparat penegak hukum setempat. Hingga Juli 2017, lalu, Bappebti sudah melakukan Rakor dengan aparat penegak hukum di Surakarta, Aceh dan Manado. Kemudian, pada Rabu 2 Agustus 2017, lalu, Bappebti menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar rakor dengan aparat penegak hukum bidang PBK di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Jadi, Ini rakor ke-4 untuk tahun 2017 yang dihadiri 50 orang yang terdiri dari perwakilan Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, OJK, Kanwil Imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, dan civitas akademika," tutur Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati.

Dihadapan aparat penegak hukum Kalbar, Sri Hariyati juga mengatakan, Bappebti akan menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus atas pelanggaran ketentuan di bidang

Pada tahun 2016-2017, Bappebti dengan Kemenkominfo telah memblokir 97 situs web bermuatan perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti- ilegal dan menyesatkan.

perdagangan berjangka, baik yang yang tidak berizin, maupun yang memiliki izin dari Bappebti.

Selain itu, Sri menambahkan, akan dibangun koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil- PPNS Bappebti dengan Korwas PPNS Polri dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu demi terwujudnya sinkronisasi penegakan hukum, khususnya di Kalimantan Barat.

Di wilayah Kalbar, terang Sri, ada 6 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka yang resmi dibawah pengawasan Bappebti. Keenam perusahaan tersebut diantaranya PT Bestprofit Futures, PT Victory International Futures, PT Askap Futures, PT Inter Pan Pasifik Futures, PT Monex Investindo Futures, serta PT Harvest Futures.

Risiko Tinggi

Lebih jauh diutarakan Sri Hariyati, untuk terhindar dari praktik investasi ilegal masyarakat awam agar berhati-hati terhadap bujukan menjadi nasabah melalui berbagai seminar forex gratis, dan mewaspada iming-iming keuntungan dan pendapatan tetap. "Hal ini kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena mereka tidak menyadari bahwa investasi di bidang PBK memiliki potensi keuntungan besar dengan risiko yang juga besar (*high risk and high return*)," katanya.

"Tetapi juga perlu diantisipasi, upaya

penggalangan dana masyarakat untuk investasi ilegal terus berkembang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sinergi Bappebti dengan aparat penegak hukum, khususnya di Kalimantan Barat untuk sensitif melihat modus yang dilakukan berbagai pihak dalam penawaran investasi," ujar Sri.

Menurut Sri Hariyati, Bappebti tidak tinggal diam terhadap maraknya perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin resmi. Upaya melindungi masyarakat dari penipuan perusahaan nakal, antara lain mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan pialang ilegal dari aktivitas perusahaan ilegal di Indonesia. Apabila masih melakukan kegiatan ilegal, maka akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pialang ilegal tersebut.

Langkah-langkah preventif juga telah dilakukan Bappebti dalam menanggulangi kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka. Pada tahun 2016-2017, Bappebti dengan Kemenkominfo telah memblokir 97 situs web bermuatan perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti- ilegal dan menyesatkan.

Selain itu, Bappebti juga menghentikan kegiatan pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti; dan seminar, baik gratis maupun disponsori broker dalam dan luar negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti sebanyak 26 kali.

Terdapat pemblokiran 2 jenis situs web, yaitu situs web yang menggambarkan perusahaan pialang ilegal dan situs web yang menduplikasi pialang legal dengan tujuan tidak baik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Duplikasi meliputi data dan informasi perizinan dari instansi yang berwenang, seperti Bappebti, OJK, bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka. Lainnya, Bappebti juga memblokir kembali situs-situs web yang terus bermunculan dan diduga dari

pialang ilegal yang sama sebanyak 14 kali tahun lalu.

Sri menambahkan, sebagian besar pengaduan yang diterima Bappebti merupakan pelanggaran di bidang transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPA] yang termasuk di dalamnya Forex, Index, dan Mata Uang. Karena itu, Bappebti masih memberlakukan kebijakan moratorium untuk penerbitan izin di bidang SPA yang telah diberlakukan sejak 15 Maret 2014.

Konfirmasi

Berdasarkan kondisi tersebut, Bappebti terus berupaya mengurangi pelanggaran-pelanggaran di bidang SPA, antara lain dengan mendorong peningkatan transaksi multilateral melalui optimalisasi peran pialang berjangka untuk gencar memasarkan produk-produk multilateral kepada masyarakat.

Selain itu, Bappebti meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui publikasi rutin dengan menginformasikan daftar nama pialang yang telah memiliki izin, cara memilih pialang yang benar, dan cara bertransaksi yang benar dengan tujuan menekan maraknya pialang ilegal-*daring*; serta melakukan penindakan, penanganan, dan pencegahan pialang ilegal yang tidak mempunyai izin usaha di bidang PBK.

"Untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang lebih lengkap terkait perusahaan pialang legal atau pun yang tidak memiliki izin Bappebti, masyarakat dapat mengunjungi website Bappebti di www.bappebti.go.id- atau melalui SMS Center Bappebti 0811-1109901 atau bisa di telepon langsung ke [021] 31924744," kata Sri.

"Jadi saran saya bagi masyarakat, jika menemukan keraguan legalitas perusahaan penawaran investasi atau pun mekanisme yang tak lazim dalam investasi, sebaiknya dapat menghubungi Bappebti. Itu lebih baik dari pada berharap untung tetapi kemudian investasinya buntung," pungkas Sri Hariyati. 

Genjot SRG dengan Edukasi

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sistem Resi Gudang- SRG, Bappebti berharap gudang-gudang SRG di berbagai daerah dapat berjalan sesuai harapan.



Tak kenal maka tak paham. Dan tentu saja jangan bermimpi untuk bisa digunakan gudang SRG jika tidak paham bisnis modelnya. Hal itulah yang menjadi ganjalan dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang di berbagai daerah.

Maka dengan sosialisasi SRG yang didukung perangkat terkait pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan SRG. Demikian antara lain dikatakan Sekretaris Bappebti, Nusa Eka dalam sambutan membuka acara Sosialisasi SRG di Auditorium Kantor Bupati Solok, pada Rabu 30 Agustus 2017, lalu. Kegiatan itu mengundang tak kurang dari 100 orang peserta dari berbagai kalangan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku koperasi tani hingga akademisi.

“Sosialisasi seperti ini bertujuan memberikan pemahaman dan

pengetahuan para petani tentang SRG untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan,” tambah Nusa Eka.

Sosialisasi merupakan bagian dari proses edukasi kepada masyarakat, dan Bappebti berkomitmen melakukan hal tersebut. Meski begitu, Eka mengaku Bappebti memiliki keterbatasan untuk mensosialisasikan dan menyentuh masyarakat yang tersebar di Indonesia hingga ke pelosok. Karenanya dia berharap agar aparat pemerintah daerah terkait dapat turun ke masyarakat memberikan pemahaman mengenai SRG.

Dari kacamata, implementasi SRG tidak akan mungkin terealisasi tanpa melibatkan para pihak (stakeholders) yang akan melaksanakan dan memanfaatkan SRG, seperti petani/UKM, pedagang, pabrik, eksportir, para pengelola gudang, koperasi, asosiasi,

akademisi, asuransi, lembaga keuangan bank maupun non bank, serta pemerintah pusat dan daerah. Dia berharap, para stakeholders itu dapat meningkatkan kerjasama dan saling bersinergi. “Peran bupati juga sangat penting untuk menciptakan koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah daerah terkait,” ujarnya.

Lebih jauh Eka mengatakan, salah satu butir Nawa Cita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jadi, butir itu berisi harapan agar pemerintah dan masyarakat siap berkontribusi dan bergerak di semua sektor pembangunan demi Indonesia yang lebih baik. “Salah satunya tentu di sektor pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara agraris,” imbuhnya.

Lebih jauh diutarakan Nusa Eka, masalah klasik dalam sektor pertanian adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. “Sebab itu, SRG menjadi solusi untuk masalah tersebut.”

“SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, poktan, gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha sebagai suatu instrumen tunda jual, dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang,” kata Nusa Eka.

SRG memiliki payung hukum UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011. Jadi, SRG merupakan instrumen dalam sistem pembiayaan maupun perdagangan yang memungkinkan pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan jaminan hanya Resi Gudang, tanpa persyaratan agunan lainnya.

“Dengan demikian, SRG dapat memfasilitasi pemberian pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, terutama bagi

petani, koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang umumnya memiliki keterbatasan *fixed asset* sebagai jaminan,” papar Nusa Eka.

SRG Solok

Data Badan Pusat Statistik- BPS mencatat, Kabupaten Solok memiliki luas wilayah 373.800 hektar dengan jumlah penduduk 363.684 jiwa. Persentase lahan sawah 16,71 % dari luas wilayah atau sekitar 62.471 Ha, yang menghasilkan 336.483 ton gabah. Adapun komoditi unggulannya yakni padi, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau.

Melihat potensi tersebut, adalah sangat pantas jika Bappebti telah mendirikan gudang SRG di kabupaten ini. Melalui dana Stimulus Fiskal pada tahun 2009, telah dibangun gudang SRG seluas 714 m² dengan kapasitas 1500 ton. Lokasinya berada di Nagari Arian, Kecamatan X Koto Singkarak. Gudang ini dipergunakan untuk komoditi beras, gabah dan jagung. Gudang ini juga dilengkapi *dryer*- mesin pengering, lantai jemur, pos jaga, area parkir, dan perlengkapan gudang lainnya.

Tapi mirisnya hingga kini gudang tersebut belum dimanfaatkan. Karena itu, Eka mengatakan, “Kami berharap agar di tahun 2017 ini, gudang SRG di Solok sudah dapat berjalan dan menerbitkan resi gudang.”

Secara umum, Eka menjabarkan, sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2008 sampai dengan akhir Juli 2017, telah terbangun 121 gudang pemerintah dan 51 gudang swasta pada 121 kota/kabupaten yang tersebar di 27 provinsi. Secara kumulatif jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 2.480 Resi dengan total volume komoditi sebanyak 89.224, 59 ton, atau total nilai sebesar Rp 506, 5 miliar.

Dia menambahkan, pembiayaan resi gudang telah dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sampai akhir Juli 2017 sebesar Rp 299,1 miliar.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendag Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi, memaparkan tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Menurutnya, beban bunga kepada peserta S-SRG (Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi) ditetapkan sebesar 6 %. “Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah,” terang Edi.

Pemerintah, lanjutnya, memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu S-SRG paling lama enam bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang. “Sedangkan maksimal kredit per petani adalah Rp 75 juta,” imbuhnya.

Edi juga menjelaskan, saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2016, terdapat 14 komoditas yang dapat diresi gudangkan. Diantaranya, gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, serta timah.

Maradona Sihotang, perwakilan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) selaku pengelola gudang SRG Kabupaten Solok, menambahkan, ada beberapa acuan komoditi yang dapat diresi gudangkan.

Diantaranya, mempunyai usia simpan yang cukup lama (misalnya 3 bulan), harga berfluktuasi: rendah (musim panen) dan tinggi (musim tanam/paceklik), mempunyai standar mutu tertentu (sesuai SNI), dan mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas.

“Komoditi juga harus potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional, terutama untuk ketahanan pangan dan ekspor,” terang Maradona.

Adapun Guru Besar Agribisnis Pertanian Universitas Andalas, Prof. Rudy Febriamansyah sebagai pembicara memberikan kesimpulannya tentang SRG. Pertama, SRG adalah salah satu sub-sistem yang masuk dalam sistem tataniaga produk pertanian yang memberi manfaat tidak hanya bagi petani, pengusaha, perbankan, maupun pemerintah. Kedua, fasilitas SRG sepenuhnya harus dilengkapi, baik perangkat keras- *hardware* maupun perangkat lunak- *software*-nya.

“Dan terakhir, SRG dapat berjalan dengan baik, apabila seluruh pihak terkait dalam mekanisme SRG dapat dalam bersinergi dengan baik,” papar Rudy Febriamansyah. 



Bimtek Calon Pengelola Gudang SRG



KEPALA Bappebti, Bachrul Chairi memberikan arahan sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Jakarta, Senin [21/08]. Turut hadir di acara Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan dan Penindakan, Sri Hariyati; Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu; dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati.

“Pelaksanaan bimtek ini merupakan salah satu terobosan dalam menyiapkan SDM calon Pengelola Gudang (koperasi/ BUMD) agar mempunyai pengetahuan tentang SRG secara komprehensif, baik aspek teknis maupun aspek manajerial,” papar Bachrul.

Bimtek calon Pengelola Gudang SRG ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Bimtek Level Manajerial yang dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2017, dan Bimtek Level Teknikal dari tanggal 4 sampai dengan 15 September 2017. Peserta dalam pelatihan ini merupakan Koperasi/ BUMD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjadi calon Pengelola Gudang SRG dari 13 daerah, antara lain Kabupaten Ngawi, Kediri, Tanah Datar, Lampung Timur, Gowa, Pasaman Barat, Kupang, Toli-Toli, Pati, Wonogiri, Indramayu, Sumedang, dan Sumbawa. 📍

FKT Penyusunan Program Dana Dekonsentrasi Pengembangan PLK 2017

KEPALA Bappebti Bachrul Chairi membuka acara Forum Konsultasi Teknis (FKT) Penyusunan Program Dana Dekonsentrasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Hotel Swissbell Rainforest Bali, Kamis [11/08].

Acara ini merupakan sarana untuk melakukan komunikasi, koordinasi, evaluasi dan konsultasi antara Bappebti dengan dinas provinsi yang membidangi perdagangan selaku penerima dana dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan PLK Tahun Anggaran 2017, serta rencana penyusunan program dan anggaran dana dekonsentrasi PLK Tahun 2018.

Peserta yang hadir pada FKT Penyusunan Program Dana Dekonsentrasi Pengembangan PLK Tahun 2017 sebanyak 45 orang dari perwakilan 14 dinas provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penerima Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang Komoditas. Di antaranya, Sumatera Barat, Jambi,



Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. 📍

Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK



KEPALA Bappebti Bachrul Chairi memberikan arahan sekaligus membuka acara Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK di Jakarta, Selasa [22/08]. Turut hadir di acara, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, Dirut PT Bursa Berjangka Jakarta Stephanus Paulus Lumintang, dan Dirut PT Indonesia Clearing House Nursalam.

Dalam arahannya, Kepala Bappebti menekankan pentingnya fungsi pengawasan dan meminta para pelaku usaha PBK menjaga kepercayaan serta menciptakan imej yang baik di industri PBK, salah satunya melalui evaluasi atas pelaporan keuangan.

Acara Konsinyering diikuti 40 orang yang terdiri dari pejabat dan staff Bappebti terkait serta perwakilan PT BBJ, PT KBI [persero], PT BKDI dan PT ICH. 📷

Konsinyering Monitoring Pengenaan Sanksi Administratif

KEPALA Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati memimpin acara Konsinyering Monitoring Pengenaan Sanksi Administratif di Jakarta, Kamis [10/08]. Turut hadir di acara Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu; dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah.

Tujuan konsinyering untuk koordinasi terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.

Acara konsinyering dihadiri oleh pejabat Eselon III, IV dan staf Bappebti terkait. perwakilan PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Kliring Berjangka Indonesia [persero], PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House. 📷



Targetkan UMKM Nasional, Lelang Gula Sepakat Dimulai Awal 2018



PEMERINTAH memundurkan waktu pelaksanaan lelang Gula Kristal Rafinasi [GKR] ke tanggal 8 Januari 2018. Penundaan ini diharapkan dapat memberikan waktu untuk meningkatkan jumlah peserta lelang, khususnya dari kalangan IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi.

“Karena tujuan pelaksanaan lelang GKR adalah untuk menjamin pasokan bagi para pelaku usaha berskala mikro

dan kecil, maka jumlah peserta lelang dari kelompok usaha tersebut perlu diupayakan untuk ditambah,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] Bachrul Chairi di Jakarta, Selasa [26/9].

Menurut Bachrul, dalam rentang waktu saat ini hingga pelaksanaan lelang, Pemerintah akan mengintensifkan sosialisasi kepada para pelaku usaha khususnya IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Hingga saat ini jumlah peserta lelang yang mewakili IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi baru terdaftar 310 peserta dari 18 provinsi, sementara untuk industri makanan dan minuman sudah terdaftar 150 peserta. Diharapkan sosialisasi dalam masa yang relatif panjang ini akan menambah jumlah peserta lelang dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia,” ungkap Bachrul.

Pengunduran waktu ini diputuskan dalam rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Jumat, 22 September 2017 lalu. Rapat tersebut memutuskan untuk mengubah waktu pelaksanaan lelang GKR dari tanggal 1 Oktober 2017 ke awal tahun depan. 

Bappebti Cabut Pembekuan Izin PT Menara Mas Futures

BAPPEBTI mencabut pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Menara Mas Futures-MMF terhitung sejak Senin 21 Agustus 2017. Dalam rilis resmi Bappebti, pencabutan pembekuan itu berdasarkan keputusan Kepala Bappebti Nomor: 01/Bappebti/Kep/Pencairan/SA/08/2017.

“Pencairan pembekuan kegiatan usaha tersebut dilakukan karena status pembekuan keanggotaan PT Menara Mas Futures telah dicairkan oleh Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, sehingga perusahaan dimaksud telah melakukan langkah-langkah perbaikan berupa pemenuhan persyaratan permodalan, dan perbaikan kepengurusan manajemen sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan,” tulis Bappebti dalam rilisnya.

Meski begitu, pencairan pembekuan kegiatan usaha MMF tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan apabila terdapat tuntutan nasabah

atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.

“Dengan dicairkannya pembekuan kegiatan usaha MMF, maka Bappebti juga mencairkan pembekuan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada MMF,” katanya.

Sebagai informasi, BBJ telah membekukan SPAB MMF pada 28 Juni 2016 lalu. Hal itu lantaran beberapa pelanggaran yang dilakukan MMF. Di antaranya, masih terdapatnya fasilitas credit margin kepada nasabah, Modal Bersih Disesuaikan-MBD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ditemukan adanya kas fiktif pada laporan keuangan MMF periode November 2015 hingga Januari 2016.

Selain itu, masih ada kekurangan modal disetor, pembukaan kantor cabang pialang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, piutang pemegang saham, serta belum tercapainya total transaksi kontrak berjangka MMF setiap bulannya. 

BBJ Bukukan Transaksi Multilateral 557.513 Lot

PELEMAHAN harga komoditas di pasar global berdampak pada tren menurun transaksi kontrak berjangka multilateral di Bursa Berjangka Jakarta- BBJ sepanjang Semester I 2017. Di sisi lain, pelaku usaha komoditas di dalam negeri saat ini cenderung bertransaksi di pasar fisik atau pasar spot.

Demikian antara lain disimpulkan Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, kepada media belum lama ini, menanggapi rendahnya pencapaian pelaku pasar pada transaksi kontrak berjangka multilateral.

"Meski demikian, transaksi kontrak berjangka komoditi kopi menyumbang kontribusi paling besar terhadap volume transaksi BBJ, tapi tingkat pertumbuhannya relatif rendah," kata Paulus. Dibandingkan bulan Januari yang transaksi multilateralnya mencapai 40.304 lot, di akhir Juli terjadi penurunan sekitar 14,14 % menjadi 34,604 lot.

Lebih jauh volume transaksi kontrak berjangka multilateral BBJ yakni 557.513 lot, atau baru mencapai 37 % dari target tahun yang dibidik di kisaran 1,5 juta lot. Dari jumlah itu, komoditas kopi mencatat kontribusi tertinggi mencapai 44,95 %, diikuti emas sekitar 38,87 %, olein 12,96 % dan kakao sebesar 4,17 %.

Melihat pencapaian itu, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, BBJ memutuskan untuk mengurangi target transaksi sekitar 30 % - 35 % dari semula yang diharapkan sekitar 1,5 juta lot. Namun Paulus prediksi hingga akhir tahun kontrak berjangka kopi masih akan menjadi penopang transaksi multilateral BBJ. "Kemungkinan persentase transaksi kopi akan berada pada kisaran 40 %-45 %. Kemudian disusul emas yang diperkirakan menyumbang 30 % transaksi. Dan sisanya akan berasal dari olein di kisaran 15 % - 20 %, serta kakao sekitar 5 % - 10 %," ucap Paulus. 

Kemendag Tetapkan HET Beras



KEMENTERIAN Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi- HET untuk beras medium dan beras premium yang berlaku untuk pasar rakyat dan toko modern. Ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang akan segera ditandatangani dan akan mulai diberlakukan pada 1 September 2017.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, mengatakan, penetapan HET beras ini dimaksudkan untuk

menurunkan harga beras yang belakangan ini cenderung mengalami kenaikan. "Dengan HET ini, konsumen mendapat kepastian harga dan terjaga daya belinya. Selain itu, HET beras juga dapat mencegah terjadinya spekulasi harga," kata Mendag, di Jakarta, Kamis [24/8].

Di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp 9.450/kg dan beras premium sebesar Rp 12.800/kg. Sedangkan di daerah Sumatera [kecuali Lampung dan Sumatera Selatan], Kalimantan, serta Nusa Tenggara Timur diberikan kelonggaran biaya distribusi ke wilayahnya sebesar Rp 500/kg. Dengan demikian, HET beras medium di wilayah tersebut menjadi Rp 9.950/kg dan premium menjadi Rp 13.300/kg. Sementara di Maluku dan Papua diberikan kelonggaran biaya distribusi ke wilayahnya sebesar Rp 800/kg, sehingga HET beras medium menjadi Rp 10.250/kg dan HET beras premium menjadi Rp 13.600/kg.

Penetapan HET ini, lanjut Mendag, juga memperhatikan kepentingan petani dan mengakomodasi pelaku usaha. "HET beras juga memberikan perlindungan kepada para petani karena menciptakan kepastian harga, sementara para pedagang tetap mendapatkan keuntungan yang wajar," tegas Enggartiasto Lukita. 

Iklm Usaha Kondusif, Ekspor Timah Diprediksi 78 ribu ton



ASOSIASI Eksportir Timah Indonesia-AETI mencatat total produksi sekaligus ekspor timah Indonesia pada semester I tahun 2017 mencapai 42.463 metrik ton. Secara *month-on-month*- MoM rata-rata produksi dan ekspor timah tahun ini berada di angka 6.000 metrik ton. Sementara, khusus Juli 2017, produksi dan ekspor timah mencapai 6.207 metrik ton.

Ketua Umum AETI, Jabin Sufianto, memperkirakan, total produksi sekaligus ekspor timah Indonesia pada tahun ini bisa mencapai 72 ribu hingga 78 ribu metrik ton. "Kalau momentumnya tidak berubah, prediksi saya paling tinggi tahun ini ekspor bisa mencapai 78.000 metrik ton dan paling rendah 72.000 metrik ton. Tergantung perkembangan nanti apakah ada regulasi yang menghambat ekspor atau tidak," ujarnya, akhir Agustus lalu.

Untuk merealisasikan jumlah total produksi dan ekspor tersebut, menurut Jabin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, menggali lebih dalam teknologi pertambangan. "Saat ini banyak perusahaan yang tidak melakukan perkembangan teknologi penggalian karena keterbatasan biaya," katanya.

Selain itu, mengurangi penambang tradisional yang saat ini tambang *onshore* dan *offshore* juga masih bergantung pada penambang tradisional. Lainnya, timah harus diproses lebih profesional.

"Jika proses pertambangan timah dilakukan lebih profesional maka akan menambah keuntungan," pungkas Jabin Sufianto. ☺

Produksi CPO Indonesia dan Malaysia Melonjak Naik

PRODUKSI minyak sawit- *crude palm oil*/ CPO dari Indonesia dan Malaysia pada tahun 2017 akan mengalami kenaikan. CEO Group Olam International, Sunny George Verghese, memperkirakan jumlah produksi Indonesia diprediksi naik menjadi 35,2 juta ton pada tahun 2017, sedangkan produksi Malaysia diperkirakan mencapai 19,7 juta ton.

Dengan kenaikan itu, Verghese melihat akan mempengaruhi harga CPO. "Harga minyak sawit cenderung turun ketika kuatnya peningkatan pada produksi terlihat lebih nyata," jelas Verghese.

Di sisi lain, prediksi kelonjakan CPO di Indonesia itu akan memberikan dampak positif. Sebab, pemerintah rencananya akan melakukan barter CPO dengan pesawat Sukhoi produksi Rusia.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia- Gapki, produksi CPO Indonesia yang diperkirakan di kisaran 35 juta ton, akan mencukupi untuk mendukung realisasi barter tersebut. "Kalau sisi produksi kita besar, cukuplah untuk



barter," ucapnya.

Meski begitu, Fadhil Hasan mengatakan, adanya barter tidak membuat produk CPO Indonesia tidak ada pasar di luar negeri. Produk CPO masih diminati oleh negara luar, meskipun tidak adanya barter. "Tanpa adanya program barter pemerintah pun CPO kita bisa dipasarkan ke berbagai negara lain. Saat ini paling besar ekspor ke India, Eropa, China, dan Pakistan. Itu artinya masih terbuka luas ekspor CPO Indonesia ke belahan dunia," kata Fadhi Hasan. ☺

Inovasi BPPT Mampu Tingkatkan Produksi Kopi RI



BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi- BPPT mencatat luas area kopi di Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan daerah lain. Sedangkan dari sisi produksi, kopi nasional hanya mencapai sekitar 700 ton pada 2016.

Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Eniya L. Dewi, mengungkapkan, produksi kopi nasional bisa lebih ditingkatkan lagi dengan inovasi teknologi. "BPPT telah merekayasa teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi di Indonesia."

"BPPT memiliki metode *ex vitro* untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi di Indonesia," ujar Eniya.

Menurutnya, teknik *ex vitro* merupakan penyediaan bibit unggul yang siap tanam di lapangan. Dengan teknologi itu tanaman pun lebih cepat tumbuh dan tentunya produktivitas lebih cepat dan hasil memuaskan.

Eniya juga mengatakan bahwa proses pada tahapan hulu- *on farm* untuk menjamin produktivitas dan kualitas serta kontinuitas pasokan buah kopi, perlu dioptimalkan. Tahap hilir- *off farm* imbuhnya, juga penting untuk diperkuat.

"Perbaikan proses pengolahan biji kopi, diversifikasi rasa dan produk penting dilakukan dengan tepat mengikuti permintaan pasar. Selain itu upaya-upaya pemanfaatan kopi sebagai media komunikasi dan penguat pariwisata sudah saatnya dioptimalkan. Jelas bahwa peningkatan kualitas dan daya saing Kopi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran inovasi teknologi," tegas Eniya L. Dewi. ☺

2020 Tin Reserves Indonesia Predicted Up

CHIEF Executive of Stania Prima Group, Rudi Irawan in his presentation in Indonesia Tin Conference an Exhibition- ITCE 2017 (in Nusadua, Bali, 27-28 August 2017), said the prediction of tin reserves in Bangka Belitung will be exhausted by 2020 if mining with production amount of 60,000 tons per year. This condition will be different if the tin production reduction of 30,000 tons per year then the tin reserves will last until 2033.

"From the survey conducted, Indonesia is not the second largest supplier in the world. China's largest tin reserve of 1.3 million tons, in second and third place is held by the Latin country one of Peru," said Rudi.

While Indonesia occupies the fourth position with a reserve of 900 thousand tons. The ratio of 75.9 percent, China, Indonesia and Malaysia produce the world's pure tin. "China consumes tin production for infrastructure so it has high value ended while we only sell semi-finished products in the form of tin bar," said Rudi Irawan.

Some of the reasons for the depression of tin reserves from Babylon were also discussed related to local issues. In addition to tin mining output emerging from new



players Myanmar and Vietnam in 2010 until now.

Environmental destruction factors, especially in Bangka Belitung is also a concern. In 2001-2014 as many as 19,000 units of unconventional mining-IT operated, it was seen that changes in Babel's livelihood policy from pepper farmers turned to miners.

"The government policy will affect the direct price and the tin production, and the supervisors and law enforcers should be concerned with the mining of IT, but also the BUMD and cooperatives so that there is a unity of price and production at the mining stage while ICDX acts as the main door of tin in the world," suggests Rudi Irawan. 📌

ICDX Gold Contract Interesting Market



INDONESIA Commodity and Derivative Exchange - ICDX throughout 2017 shows quite good performance compared to 2016, then. It can be shown from the performance of multilateral and bilateral futures contracts. Throughout August 2017, multilateral contracts recorded a volume of 59,728 lots.

"Meanwhile, multilateral futures contracts dominate trading in ICDX, gold futures contracts with volume of 14,092 lots and commodity transactions of 1,319

lots," said CEO ICDX Lamon Rutten.

The high interest of investors in the gold futures contract at ICDX because the gold futures contract has many benefits. "From many studies, investors who have a gold portfolio because the price of gold is not directly correlated with various types of other investments such as stocks and property or real estate. As a result, adding to the portfolio of gold commodities, investors will secure the value of its assets and minimize risks," said Lamon.

Meanwhile, he said, if the market is in a state of uncertainty, then an investor will protect his assets with gold commodities.

Lamon predicted, the price of gold futures contracts in the global market will move up within a year. "Geopolitics on the North Korean peninsula are currently helping to lift gold prices and maybe for some time to come," said Lamon Rutten. 📌

Glossary

1. CLEAR

The process by which a clearing house maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member.

2. CLEARING

The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

3. CLEARING CORPORATION

An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

4. CLEARING

Margin Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers' open futures and options contracts.

5. CLEARING MEMBER

A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member.

6. CLEARING PRICE

See Settlement Price.

7. CLEARINGHOUSE

An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin.

8. CLOSE END FUNDS

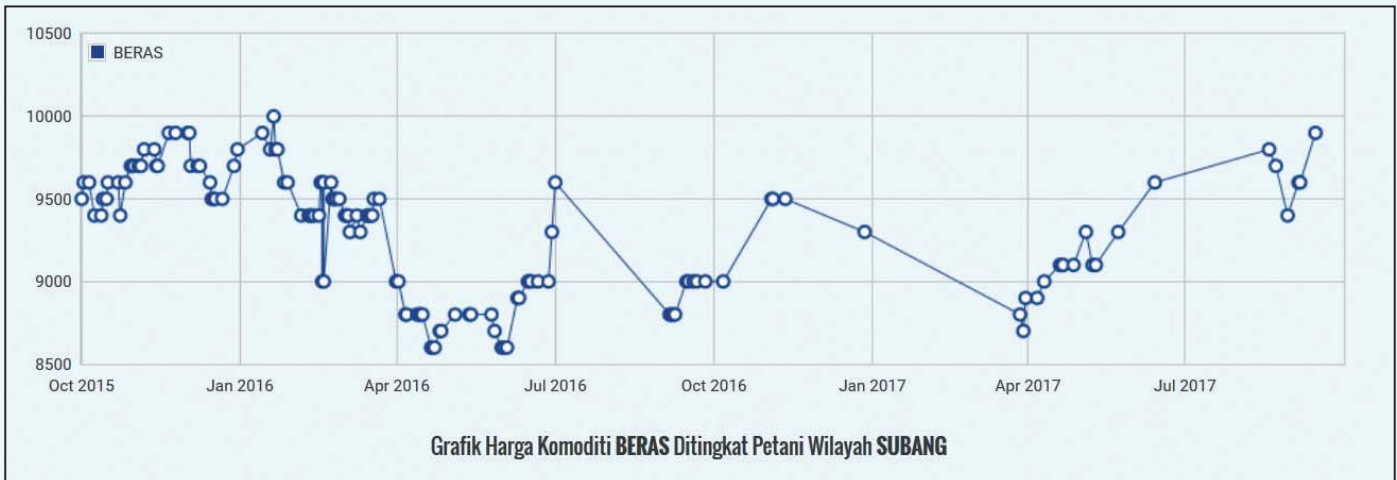
Managed investment which is listed on the stock exchange. The price of its shares will be determined according to demand and supply.

9. CLOSE OUT

To trade an equal and opposite futures transaction to that already held. See also offset.

10. CLOSE, THE

The period at the end of the trading Session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close".



<http://infoharga.bappebti.go.id/>



Harga beras secara nasional sepanjang Agustus 2017 merangkak naik. Kenaikan ini terjadi pada tingkat petani dan penggilingan. Untuk di wilayah Subang, harga beras di tingkat petani dari yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.400 terus melonjak naik di kisaran Rp9.900. Kenaikan harga tersebut didorong oleh penurunan produksi di sentra-sentra beras nasional, karena panen yang terjadi di beberapa daerah lumbung padi tidak serentak.



<http://infoharga.bappebti.go.id/>



Harga kopi di Lampung pada bulan Agustus 2017 sempat mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi faktor global, yakni didorong oleh tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Tapi, harga kopi kembali tertekan oleh isu-isu fundamental. Di antaranya adalah musim panen di Brasil yang hampir selesai serta produktivitas pengolahan kopi yang menurun. Selain itu, yakni penundaan kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang pada akhirnya membuat mata uang Negeri Paman Sam tersebut melemah. Sepanjang Agustus 2017, harga kopi di tingkat petani wilayah Lampung mencapai Rp24.000 hingga 25.000/kg.



Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke SMS Center Info Harga Bappebti.



SMS request informasi harga ditulis dengan format: HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH] dan dikirim ke nomor 0812 1867 8000
Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU



Layanan 24 jam Unit TI Bappebti

Pipiet Faizal Amin

Kepala Subbagian Teknologi Informasi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti sebagai lembaga pembina dan pengawas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memiliki peran strategis dalam melindungi dan menjamin transaksi para pelaku pasar yang terselenggara di bursa berjangka berlangsung aman dan tidak terjadi manipulasi. Oleh karena perannya yang strategis itu, Bappebti didukung satuan unit di bidang Teknologi Informasi- TI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Bagian Pengembangan Data dan Teknologi Informasi berada di bawah Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar.

Bagian Pengembangan Data dan Teknologi Informasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap; *Pertama*, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. *Kedua*, Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Pengembangan Data dan Teknologi Informasi dibantu oleh 2 [dua] Kepala Subbagian yaitu Kepala Subbagian Data dan Kepala Subbagian Teknologi Informasi.

Saat ini sebagian besar *business process* yang ada di Bappebti sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik yang bersifat pelayanan terhadap pelaku usaha/ masyarakat maupun kegiatan yang bersifat pengawasan dan kegiatan yang bersifat internal.

Beberapa layanan yang ada di bagian TI Bappebti saat ini

sudah dilakukan secara *online* antara lain melayani perizinan pelaku usaha, pengaduan nasabah, penyampaian pelaporan keuangan pelaku usaha, mengelola *website* Bappebti, SRG *Mobile*, Sistem Informasi Harga Komoditi dan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Pelayanan yang dilakukan bagian TI Bappebti secara *online* tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, serta untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan, kewajiban penyampaian laporan keuangan dan lain sebagainya.

Selain kegiatan yang bersifat pelayanan, saat ini kegiatan pengawasan yang dilakukan di Bappebti juga sudah memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi dengan *stakeholder* terkait, maka diharapkan pengawasan yang ada di Bappebti menjadi lebih optimal.

Untuk mendukung operasional terkait penggunaan teknologi informasi, saat ini Bappebti memiliki infrastruktur teknologi informasi berupa data center Bappebti yang senantiasa dijaga agar tetap dapat beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam sehari dan bekerja selama 7 hari penuh.

Selain itu, bagian TI Bappebti yang menjalankan operasional pelayanan berbasis *online* setiap saat dituntut untuk peka terhadap perubahan penggunaan teknologi dari waktu ke waktu. Hal ini untuk dapat mengantisipasi terjadinya gangguan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi. 

Syarat Keberhasilan Kontrak Berjangka

*] Pantas Lumban Batu

Di kalangan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi global, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa persyaratan berhasilnya suatu kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan oleh bursa berjangka sangat tergantung dari kondisi ekonomi suatu negara. Bisa saja satu kontrak berjangka likuid di satu negara tetapi tidak demikian di negara lain.

Namun, tidak ada bukti yang memastikan bahwa setiap kontrak berjangka komoditi yang memenuhi persyaratan akan likuid atau sukses dipasarkan oleh bursa berjangka. Tetapi belajar dari pengalaman beberapa bursa berjangka dunia, keberhasilan kontrak berjangka komoditi yang diluncurkan bursa harus memenuhi beberapa syarat, seperti berikut ini;

1. Komoditi yang diperdagangkan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak

Banyaknya produksi dan banyaknya konsumsi yang cukup besar atas suatu komoditi merupakan faktor utama ramainya suatu pasar. Volume komoditi di pasar fisik sangat berpengaruh terhadap volume transaksi di pasar berjangka. Hal ini juga akan mempunyai implikasi terhadap likuiditas pasar yang mendorong investor/spekulators maupun hedgers melakukan transaksi. Tersedianya komoditi dalam jumlah yang banyak sangat berpengaruh terhadap minat para hedger untuk melakukan transaksi. Selain itu tidak ada kekhawatiran apabila kontrak berjangka jatuh tempo untuk menerima penyerahan barang.

2. Komoditi diperdagangkan secara bebas dan mempunyai karakteristik yang homogen

Komoditas yang diperdagangkan secara bebas serta memiliki karakteristik homogen sehingga tidak terdapat praktik monopoli atau oligopoli. Dengan demikian, komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka memiliki karakter seperti komoditi yang bernilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara bebas, mempunyai standar mutu tertentu, selalu tersedia dan dapat disimpan dalam waktu tertentu serta mempunyai atau premi dalam tingkat penyerahan mutu yang berbeda.

3. Ada kebutuhan para pelaku pasar

Adanya kebutuhan mengenai pengelolaan risiko harga dari dunia usaha khususnya yang berusaha di bidang komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan perkembangan likuiditas pasar yang ditandai dengan banyaknya pelaku pasar baik sebagai *hedger*, investor dan spekulator. Di sisi lain, pihak pembeli maupun penjual dan tidak ada yang memiliki posisi dominan yang dapat menguasai atau mengendalikan pasar.

4. Komoditi sebagai subjek kontrak berjangka harganya berfluktuasi

Harga komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka harus mempunyai ciri yaitu harga yang berfluktuasi. Terjadinya fluktuasi harga adalah merupakan gambaran dari besarnya *supply and demand* terhadap komoditi tersebut.

5. Kemudahan masuk atau keluar pasar

Pembeli dan penjual harus dengan mudah untuk masuk atau keluar dari pasar. Oleh karena itu, persyaratan margin yang ditetapkan tidak memberatkan semua pihak dan tersedianya sistem kliring yang kuat.

6. Cukup banyak pembeli dan penjual yang tidak terkait

Intervensi secara vertikal dari kelompok perusahaan pengguna bursa seharusnya tidak terlalu dominan, sebaliknya di sini perusahaan akan dapat menciptakan suatu kemungkinan manajemen risiko yang dapat menyediakan terciptanya pembentukan harga sebagai tujuan daripada kegiatan bursa berjangka.

7. Tidak ada integrasi vertikal baik pembeli maupun penjual dipasar

Para pelaku pasar pun tidak terintegrasi secara vertikal dalam bisnis komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka. Suatu integrasi vertikal yang tinggi antara produksi dan pengolahan komoditi akan menghalangi terbentuknya suatu kontrak berjangka yang aktif, karena harga ditetapkan dalam intern perusahaan dari hulu sampai ke hilir.

8. Tidak ada campur tangan pemerintah

Suatu pasar harus mempunyai keyakinan bahwa dalam kegiatan perdagangan berjangka, pemerintah tidak akan campur tangan dalam mekanisme pembentukan harga. Di samping itu, kebijakan pemerintah pun tidak sering melakukan perubahan kebijakannya. Para anggota perdagangan berjangka harus pula mempunyai kepercayaan diri bahwa badan yang mewakili pemerintah harus netral dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu.

9. Partisipasi investor atau spekulator

Partisipasi investor/spekulator sangat signifikan dalam meningkatkan likuiditas transaksi suatu kontrak berjangka. Tanpa likuiditas yang cukup banyak dalam suatu kontrak yang diperdagangkan, maka investor/spekulator akan enggan untuk memasuki suatu pasar karena kemudahan melikuidasi posisi berkurang. Pada saat investor/spekulator melikuidasi posisinya, mereka memerlukan partisipasi yang lain untuk mengambil posisi sebaliknya. Apabila jumlah peserta di dalam bursa sedikit akan berakibat sulitnya melikuidasi posisi. Hal ini tidak menarik untuk investor/spekulator yang ingin mudah masuk atau mudah keluar dari suatu posisi yang di transaksikannya.

10. Mekanisme penyerahan yang terjamin

Dalam penyerahan yang penting adalah di mana gudang harus dekat dengan pasar fisik. Suatu hal yang dipermasalahkan dalam perdagangan berjangka tentang penyerahan di mana gudang-gudang yang tersedia dikuasai oleh satu kelompok tertentu, hal ini memberikan kepada kelompok tersebut suatu posisi yang sangat menguntungkan tetapi dapat merugikan bagi pihak yang menguasai gudangnya.

11. Kemampuan menarik dan memikat para hedger

Jumlah satuan dalam kontrak berjangka harus dapat mengakomodasikan kebutuhan pedagang besar, prosesor, pedagang kecil, pemakai atau investor kecil.

12. Penetapan kontrak berjangka

Kontrak Berjangka merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan untuk dapat terselenggaranya kegiatan perdagangan secara baik dan dapat diminati oleh para pelaku pasar. Oleh karena itu sebelum subjek kontrak berjangka diperdagangkan terlebih dahulu dilakukan penelitian antara lain untuk mengetahui adanya kebutuhan, bermanfaat bagi pengusaha dan perekonomian dan kemungkinan peluang bisnis serta kemungkinan likuiditas kontrak tersebut. Di samping itu diteliti juga proposal dan spesifikasi kontrak, khususnya mengenai persyaratan standar yang tercantum di dalamnya, termasuk mata uang yang dipergunakan.

13. Spesifikasi kontrak untuk suatu komoditi

Penjual dan pembeli yang benar menggunakan kontrak berjangka untuk kebutuhan lindung nilai dan tempat pembentukan harga tergantung atas jenis kontrak yang diperdagangkan di bursa dikaitkan dengan kondisi pasar fisik yang bersangkutan. Spesifikasi kontrak sekurang-kurangnya terdapat jam perdagangan, bulan penyerahan, hak dan tanggung jawab penjual dan pembeli, volume dan mutu yang dapat diserahkan, tempat penyerahan, tata cara dan penyerahan dokumen, mata uang dan perubahan harga minimum, batas fluktuasi harga yang diijinkan dan proses kliring, cidera janji dan penyelesaian sengketa serta keadaan darurat.

14. Infrastruktur yang cukup

Tersedianya fasilitas dan infrastruktur pasar berjangka yang strategis dan memadai merupakan suatu syarat mutlak dalam perdagangan di bursa berjangka. Selain itu, tersedia juga fasilitas penyelesaian perdagangan berjangka dalam bentuk *cash settlement*, mekanisme perdagangan yang jelas. Sehingga harga yang terjadi pada saat penyerahan dan harga pada masa yang akan datang akan sama dan berakhir berdasarkan bulan pada saat terjadi transaksi kontrak yang diperdagangkan.

15. Sumber informasi akurat

Tersedianya informasi harga yang *up to date* yang bebas bagi seluruh pelaku pasar. Di sini informasi harus lancar dan tersedia bagi semua peserta yang berhubungan dengan komoditi yang diperdagangkan. Informasi harga di bursa harus tersedia dan disebarluaskan setiap saat bagi seluruh masyarakat pengguna jasa informasi. Terutama pada pusat fasilitas perdagangan dan sarana teknologi yang merupakan persyaratan informasi bursa harus lancar dan akurat. Tersedianya jaringan informasi yang berkaitan dengan perdagangan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang dapat diakses secara mudah oleh semua pihak.

16. Lingkungan yang mendukung

Adanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung terhadap bisnis yang berkelanjutan. Keadaan ekonomi, politik, hukum dan peraturan-peraturan yang ada harus dapat mendukung dan mendorong lingkungan usaha serta kebijakan moneter yang bebas khususnya lalu lintas devisa. Para pengusaha akan berlomba dalam perdagangan berjangka, apabila mereka mendapat keuntungan karena lingkungan berusaha yang kondusif. ☺

***] disarikan dari Buku Penulis; Pasar derivatif**



INDONESIA CLEARING HOUSE

Nursalam, Dirut PT Indonesia Clearing House

Menapak Karir dari Zona Berbeda

Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait di bidang perdagangan berjangka komoditi atau lembaga keuangan, karir Nursalam sampai juga di puncaknya memimpin sebuah lembaga kliring.



Nursalam, pria berzodiak Virgo ini, jika diajak berdialog atau pun diskusi sangatlah menyenangkan. Apalagi hal yang didiskusikan itu adalah satu topik yang dekat dengan kebiasaannya. Misalnya, bicara soal keragaman komoditi kopi yang banyak ditemukan di tanah air, dia pasti dengan tangkas mengatakan, “semua kopi itu rasa dan aromanya enak. Yang terpenting adalah cara penyajian dan menikmatinya.”

“Jika penyajiannya dilakukan biasa-biasa saja, maka hasilnya pun tak akan maksimal. Tetapi jika dilakukan dengan teknik yang benar, maka tanpa dibubuhi gula pun rasa kopi akan nikmat sekali. Karena itu, jika minum kopi saya lebih senang tidak menggunakan gula. Itulah pria sejati penikmat kopi,” seloroh Nursalam.

Menurut pengakuan Nursalam, kebiasaannya menikmati kopi diawali

dari kesibukan kegiatannya yang banyak mengunjungi daerah penghasil kopi. “Ketika saya ke Kota Medan, misalnya, jika ditanya apa oleh-oleh khas kota tersebut pasti di antaranya ada yang menjawab kopi.”

Maka saya pun membeli kopi. Padahal, saya sebelumnya tidak terlalu suka dengan minuman kopi. Tapi karena banyak juga teman yang penikmat kopi dan di berbagai kesempatan pertemuan selalu disuguhkan minuman kopi, maka saya pun mencoba mencari tahu dari berbagai sumber cara penyajian kopi yang nikmat dan menghasilkan aroma yang menantang adrenalin, katanya.

Jika dilihat dari watak pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, 24 Agustus 1969 ini, memang tak salah jika dikatakan mudah bergaul dan bersosialisasi. Karena itu pula dia memiliki banyak jaringan dan bersahabat dengan banyak orang. “Memang

kalau diingat-ingat, saya pun tak habis pikir kenapa bisa nyasar di industri perdagangan berjangka ini. Padahal dulu saya seorang pendidik di sebuah sekolah swasta di Jawa Timur,” kata ayah dari dua anak ini.

Perjalanan karir Alumni Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi, Univ. Kristen Jawa Timur tahun 1993 ini terbilang cukup panjang di industri perdagangan berjangka komoditi. Dikatakannya, sekitar tahun 1994- an di Kota Surabaya, banyak teman yang bercerita tentang sukses investasi di bursa, maka saya pun tertarik untuk mempelajarinya. Karena bidang ini cukup menantang dan membutuhkan waktu yang intensif, maka saya pun memutuskan untuk bergabung di sebuah perusahaan *commission house*. Tetapi kemudian tidak cukup di situ, saya memutuskan pindah ke kota Jakarta, yang pasarnya lebih besar dibandingkan Surabaya.

Nah, di periode tahun 1996, dari sisi pemerintah ternyata ada program pembahasan rancangan undang-undang di bidang perdagangan berjangka komoditi. Maka kami yang saat itu ada di perusahaan *commission house*, sering diundang diskusi bersama oleh Anggota DPR RI untuk membahas praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi. Kemudian di akhir tahun 1997, terbitlah UU No. 32 Tahun 1997, Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Karena sudah ada payung hukum yang mengatur di bidang perdagangan berjangka komoditi, maka saya pun memilih untuk bergabung di salah satu perusahaan pialang berjangka komoditi anggota Bursa Berjangka Jakarta- BBJ. "Saat itu saya adalah orang dengan nomor urut punggung ke empat yang bertugas di lantai bursa. Karena zaman itu BBJ masih menggunakan sistem perdagangan konvensional. Order atau anamat atau nasabah dilakukan secara manual oleh petugas pialang berjangka di lantai bursa."

Kepercayaan

Beberapa tahun kemudian, saya dipercaya pemilik modal untuk memimpin sebuah perusahaan pialang berjangka, tutur Nursalam. "Tetapi tidak lama setelah membangun perusahaan pialang itu, sekitar tahun 2008 saya mencoba peruntungan bergabung di lembaga kliring yang saat itu bernama PT Identrust Security Internasional- ISI." Lembaga kliring ini merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari aktivitas Indonesia Commodity and Derivative Exchange- ICDX. Kemudian di tahun 2015, ISI berubah nama menjadi PT Indonesia Clearing House- ICH. Dan saya pun ditunjuk dan dipercaya sebagai pucuk pimpinan ICH hingga saat ini.

"Jadi kalau ditanya soal perjalanan karir di bidang perdagangan berjangka komoditi, saya sudah cukup merasakan asam, asin, pahit dan manisnya industri ini. Tetapi kalau boleh jujur, saya belum puas dan masih mencari titik kulminasi likuidnya industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, seperti layaknya praktik perdagangan berjangka komoditi di mancanegara," kata pria berkacamata ini.

Tetapi saya cukup yakin di masa mendatang industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia mampu berkompetisi dengan bursa sejenis dari mancanegara. Hanya saja semua *stakeholder* harus kerja keras dan memiliki visi sesuai dengan tugas



dan tanggungjawabnya.

"Kami saat ini di ICH sedang mempersiapkan berbagai hal terkait dengan rencana ICDX meluncurkan kontrak berjangka timah. Tugas beratnya, ICH harus menggaransi dan memastikan adanya barang yang akan ditransaksi. Artinya, perusahaan *smelter* harus masukan barang ke gudang kemudian gudang keluaran Bukti Simpan Timah. Bukti inilah yang kemudian dikirim ke ICH sebagai dokumen yang memastikan bahwa timah sudah ada di gudang," jelas Nursalam yang juga punya hobi fotografi ini.

Setelah bukti tersebut sudah diterima, maka secara sistem, tambahnya, kliring-ICH akan membuka akses perusahaan untuk bertransaksi sesuai jumlah barang yang ada di gudang. Sehingga secara otomatis perusahaan tidak bisa menjual dalam jumlah lebih besar dari yang ada di gudang.

"Jadi kalau saya lihat, salah satu kelemahan selama ini kurang berjalannya kontrak berjangka multilateral disebabkan bursa berjangka tidak memiliki mitra pengelola gudang yang terpercaya dan independen sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, ICDX dalam rencana perdagangan kontrak berjangka timah telah mendirikan PT ICDX Logistik Berikat- ILB di Pangkalpinang, Bangka Belitung," jelasnya.

Lalu pertanyaannya, apakah ILB bisa independen dan dipercaya? Menurut Nursalam, pengelolaan ILB telah diatur secara rinci sesuai dengan Peraturan Dirjen

Bea Cukai, Nomor Per-10/BC/2017, tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam Rangka Ekspor dan atau *Transshipment*.

"Itu artinya, pengawasan operasional ILB berada di bawah Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," kata Nursalam, optimis.

"Bagi ICH, dengan hadirnya ILB akan memudahkan tugas lembaga kliring dalam menjamin ketersediaan komoditi timah yang ditransaksikan oleh ICDX. Di sisi lain, kehadiran ILB yang terkoneksi dengan ICH akan memudahkan *smelter* dalam melakukan ekspor timah. Kalau sebelumnya kontrak timah dilakukan dengan pola *free on board-FOB* yakni menghantar barang sampai ke atas kapal. Maka sekarang penyerahannya dilakukan di gudang ILB," papar Nursalam.

Mengulik sisi pribadi Nursalam mungkin tak akan ada habis-habisnya. Dalam sebuah kesempatan, dikatakannya, "Saya paling suka koleksi benda-benda yang menurut saya unik." Misalnya topi, kamera, dan *handphone*. Diakuinya, dia memiliki *handphone* dari generasi pertama dari sebuah merek ternama.

"*Handphone* ini sudah saya miliki sejak beberapa tahun lalu. Dan sampai saat ini masih berfungsi dan bagus, suaranya pun sangat jelas. Hanya saja terkadang terlalu repot dibawa ke mana-mana. Kalau pun mau disisipkan di pinggang, rasanya sudah tak mungkin karena terhalang perut sudah terlanjur buncit," kelakar Nursalam. ☺

Terhindar dari Praktik Investasi Bodong



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
 *SMS dikenakan biaya regulat (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Sujito, Jakarta (46) - 08562728xxxx

Tanya:

Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) di salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel tentang perdagangan berjangka komoditi, dan di artikel tersebut terdapat kalimat perdagangan berjangka multilateral dan bilateral. Terkait itu, saya ingin menanyakan apa pengertian dengan perdagangan berjangka multilateral dan bilateral.

Jawaban:

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, dijelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan oleh bursa berjangka terdapat dua jenis yakni perdagangan berjangka multilateral dan bilateral. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka multilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan oleh banyak pembeli dan penjual anggota bursa berjangka terhadap sebuah subjek atau kontrak berjangka berbasis komoditi (pertanian, perkebunan, tambang, keuangan, dsb). Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan berjangka bilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan antara perusahaan pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah dengan perusahaan pedagang berjangka (penyelenggara) terhadap subjek kontrak berjangka komoditi (valuta asing, emas, indeks, dsb).

Terima kasih.

TIME FRAME PENANGANAN PENGADUAN NASABAH – PIALANG



PIALANG BERJANGKA



Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id